



Peran Paralegal sebagai Jembatan antara Masyarakat Desa dan Sistem Layanan Hukum Formal Melalui Posbankum Desa/Kelurahan

Nadya Putri Layyina Hamzah¹, Siti Zahwa Ainun Nissa²

^{1,2} Universitas Nusa Putra, Indonesia

Email: nadyaput16@gmail.com¹, sitizahwaainun@gmail.com²

Abstrak

Akses masyarakat desa terhadap layanan hukum masih menghadapi berbagai hambatan, seperti keterbatasan pengetahuan hukum, jarak dengan lembaga bantuan hukum, serta minimnya informasi mengenai layanan hukum gratis. Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan hadir sebagai ruang layanan hukum yang lebih dekat dengan masyarakat, dengan paralegal berperan sebagai penghubung utama antara masyarakat desa dan sistem layanan hukum formal. Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan melalui program magang mahasiswa di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Jawa Barat, Divisi Penyuluhan dan Bantuan Hukum, dengan menggunakan pendekatan partisipatif berupa keterlibatan langsung dalam pendampingan administrasi, dokumentasi, pengelolaan data Posbankum dan paralegal, serta pendampingan pelatihan paralegal melalui virtual clinic. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa paralegal memiliki peran strategis dalam menerima pengaduan, memberikan informasi hukum dasar, mendukung penyelesaian sengketa secara non-litigasi, serta menghubungkan masyarakat dengan advokat atau Organisasi Bantuan Hukum apabila diperlukan. Keterlibatan mahasiswa magang turut mendukung ketertiban administrasi dan pengelolaan data yang menjadi bagian penting dari keberlanjutan program Posbankum Desa. Kegiatan ini menyimpulkan bahwa penguatan peran paralegal dan dukungan administrasi yang tertib menjadi kunci dalam memperluas akses keadilan bagi masyarakat desa.

Kata Kunci: Akses Keadilan, Bantuan Hukum, Masyarakat Desa, Paralegal, Pos Bantuan Hukum Desa.

The Role of Paralegals in Expanding Access to Justice through Village Legal Aid Posts: A Student Internship Experience at the Regional Office of the Ministry of Law of West Java

Abstract

Access to legal services in rural communities continues to face various challenges, including limited legal knowledge, long distances to legal aid institutions, and inadequate information regarding free legal assistance. Village/Sub-district Legal Aid Posts (Posbankum) were established to bring legal services closer to the community, with paralegals serving as the primary link between rural residents and the formal legal system. This community service activity was conducted through a student internship program at the Regional Office of the Ministry of Law of West Java Province, Division of Legal Counseling and Legal Aid, using a participatory approach through direct involvement in administrative assistance, documentation, management of Posbankum and paralegal data, and support for paralegal training through virtual clinics. The results demonstrated that paralegals played a strategic

role in receiving public complaints, providing basic legal information, supporting non-litigation dispute resolution, and connecting community members with advocates or Legal Aid Organizations when necessary. The participation of student interns also contributed to improving administrative order and data management, which are essential for the sustainability of the Village Legal Aid Post program. This activity concludes that strengthening the role of paralegals and maintaining well-organized administrative support are key factors in expanding access to justice for rural communities.

Keywords: Access to Justice, Legal Aid, Rural Communities, Paralegals, Village Legal Aid Posts.

PENDAHULUAN

Akses masyarakat desa terhadap layanan hukum masih menghadapi berbagai hambatan, seperti keterbatasan pengetahuan hukum, jarak dengan lembaga bantuan hukum, serta minimnya informasi mengenai layanan bantuan hukum gratis (Setiawan, 2021). Dalam praktiknya, kebutuhan terhadap bantuan hukum tidak hanya muncul ketika seseorang telah berhadapan dengan proses pengadilan, tetapi juga sejak tahap awal ketika masyarakat mulai mengalami persoalan, kebingungan, atau konflik yang berhubungan dengan hak dan kewajibannya.

Bagi sebagian masyarakat desa, hukum masih sering dipandang sebagai sesuatu yang jauh, rumit, dan membutuhkan biaya besar. Pandangan tersebut tidak sepenuhnya lahir tanpa alasan. Keterbatasan pengetahuan hukum, jarak dengan lembaga bantuan hukum, minimnya informasi mengenai layanan hukum gratis, serta rasa takut untuk berhubungan dengan aparat atau lembaga formal menjadi hambatan yang cukup nyata. Akibatnya, tidak sedikit persoalan hukum di tingkat desa yang dibiarkan berlarut-larut atau diselesaikan secara informal tanpa pemahaman yang memadai terhadap akibat hukumnya.

Persoalan hukum yang terjadi di masyarakat desa juga sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Masalah tersebut dapat berupa sengketa tanah, waris, utang-piutang, konflik keluarga, administrasi kependudukan, kekerasan, maupun perselisihan antarwarga. Masyarakat yang menghadapi persoalan seperti ini sering kali belum mampu mengklasifikasikan masalahnya ke dalam kategori hukum tertentu. Mereka biasanya datang dengan cerita, keluhan, atau pengalaman ketidakadilan yang membutuhkan pendampingan awal agar dapat dipahami secara lebih terarah.

Pos Bantuan Hukum (POSBANKUM) Desa merupakan salah satu upaya pemerintah dalam memperluas akses keadilan melalui penyediaan layanan hukum yang mudah dijangkau oleh masyarakat di tingkat desa dan kelurahan (Kementerian Hukum RI, 2025). POSBANKUM Desa hadir sebagai ruang layanan hukum yang lebih dekat dengan masyarakat. Kehadirannya membuka peluang bagi warga untuk memperoleh informasi hukum awal, menyampaikan pengaduan, berkonsultasi, serta mendapatkan arahan mengenai langkah penyelesaian yang sesuai. Dengan adanya layanan di tingkat desa, masyarakat tidak harus selalu menempuh jarak jauh atau merasa terhalang oleh biaya ketika membutuhkan bantuan hukum.

Urgensi Posbankum Desa

POSBANKUM Desa memiliki urgensi karena menjadi pintu awal bagi masyarakat dalam mengakses layanan hukum. Layanan ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat menerima pengaduan, tetapi juga sebagai ruang yang membantu masyarakat memahami persoalan yang sedang dihadapi. Pada tahap awal, masyarakat dapat memperoleh penjelasan mengenai hak, kewajiban, serta pilihan penyelesaian yang tersedia, baik melalui musyawarah, mediasi, maupun rujukan kepada pihak yang lebih berwenang.

Kedekatan POSBANKUM Desa dengan masyarakat menjadikannya berbeda dari layanan hukum formal yang biasanya berada di wilayah perkotaan atau lembaga tertentu. Bagi masyarakat desa, kedekatan lokasi dan kemudahan akses merupakan hal yang sangat menentukan. Ketika layanan hukum tersedia di tingkat desa, masyarakat memiliki tempat

yang lebih mudah dijangkau untuk bertanya dan menyampaikan permasalahan sebelum masalah tersebut berkembang menjadi konflik yang lebih besar.

Urgensi POSBANKUM Desa juga dapat dilihat dari fungsinya dalam mendorong penyelesaian masalah secara lebih tertib. Tidak semua persoalan hukum harus langsung dibawa ke pengadilan. Beberapa masalah dapat diselesaikan melalui komunikasi, musyawarah, atau mediasi, sepanjang dilakukan dengan memperhatikan hak-hak para pihak. Melalui mekanisme ini, POSBANKUM Desa dapat membantu meredam konflik sosial dan mendorong penyelesaian yang lebih damai di lingkungan masyarakat.

Di Jawa Barat, keberadaan POSBANKUM Desa menjadi semakin relevan karena wilayah ini memiliki jumlah desa dan kelurahan yang besar. Pembentukan POSBANKUM di tingkat desa dan kelurahan menunjukkan adanya upaya untuk memperluas akses keadilan secara lebih merata. Dengan demikian, POSBANKUM Desa tidak hanya dipahami sebagai program administratif, tetapi juga sebagai sarana pelayanan publik yang membantu menghadirkan hukum secara lebih dekat, sederhana, dan manusiawi bagi masyarakat.

Peran Paralegal

Paralegal memiliki peran strategis dalam memberikan bantuan hukum nonlitigasi, penyuluhan hukum, konsultasi, mediasi, serta menghubungkan masyarakat dengan pemberi bantuan hukum sesuai ketentuan yang berlaku (Maharani et al., 2024). Peran ini diperlukan karena masyarakat yang datang ke POSBANKUM sering kali belum dapat menjelaskan masalahnya dengan bahasa hukum yang rapi.

Paralegal dapat dipahami sebagai jembatan antara masyarakat desa dan sistem layanan hukum formal. Paralegal tidak menggantikan kedudukan advokat, penyuluh hukum, atau organisasi bantuan hukum, tetapi membantu masyarakat pada tahap awal agar lebih memahami persoalan yang dihadapi. Melalui peran tersebut, masyarakat tidak langsung dihadapkan pada prosedur hukum yang rumit, melainkan dibantu terlebih dahulu untuk mengenali masalah, menyiapkan informasi, dan memahami pilihan penyelesaian yang tersedia.

Peran paralegal juga berkaitan dengan pelayanan informasi hukum dasar. Banyak masyarakat yang sebenarnya membutuhkan bantuan, tetapi tidak mengetahui apakah permasalahannya dapat diselesaikan melalui konsultasi, mediasi, atau perlu dirujuk kepada lembaga bantuan hukum. Dalam situasi seperti ini, paralegal membantu memberikan arahan awal agar masyarakat tidak salah langkah. Arahan tersebut menjadi penting karena keputusan yang diambil tanpa pemahaman hukum dapat menimbulkan persoalan baru.

Selain itu, paralegal juga berperan dalam mendukung administrasi layanan. Pencatatan identitas, kronologi, pihak yang terlibat, serta bentuk bantuan yang dibutuhkan merupakan bagian penting dari pelayanan pengaduan. Administrasi yang tertib akan memudahkan proses tindak lanjut, terutama apabila suatu perkara perlu dirujuk kepada advokat atau organisasi pemberi bantuan hukum. Dengan demikian, peran paralegal tidak hanya bersifat komunikatif, tetapi juga membantu menjaga agar pelayanan berjalan lebih terstruktur.

Dalam masyarakat desa, paralegal juga dapat menjadi fasilitator penyelesaian non-litigasi. Beberapa persoalan dapat lebih tepat diselesaikan melalui dialog, musyawarah, atau mediasi. Paralegal dapat membantu membuka ruang komunikasi dan mendorong penyelesaian yang tidak memperuncing konflik. Peran ini penting karena hukum tidak selalu harus hadir dalam bentuk persidangan, tetapi juga dapat hadir melalui proses penyelesaian yang damai, adil, dan dapat diterima oleh para pihak.

Konteks Pengabdian

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan dalam konteks program magang mahasiswa yang berkaitan dengan pelayanan hukum masyarakat, khususnya dalam mendukung pelaksanaan POSBANKUM Desa di bawah pembinaan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat. Dalam posisi ini, mahasiswa tidak hanya menjalankan tugas administratif, tetapi

juga memperoleh pengalaman langsung mengenai bagaimana layanan hukum dihadirkan lebih dekat kepada masyarakat desa.

Pengabdian ini menjadi ruang pembelajaran yang mempertemukan aspek akademik dengan praktik pelayanan publik. Mahasiswa dapat melihat secara langsung bagaimana masyarakat menyampaikan pengaduan, bagaimana paralegal membantu memahami masalah hukum, serta bagaimana suatu persoalan diarahkan kepada mekanisme penyelesaian yang sesuai. Pengalaman tersebut memberikan pemahaman bahwa hukum tidak hanya hidup dalam peraturan tertulis, tetapi juga hadir dalam kebutuhan masyarakat sehari-hari.

Konteks pengabdian ini juga memperlihatkan bahwa pelayanan hukum di tingkat desa membutuhkan pendekatan yang komunikatif dan mudah dipahami. Masyarakat yang datang ke POSBANKUM tidak selalu membawa dokumen lengkap atau pemahaman hukum yang memadai. Karena itu, pelayanan awal yang ramah, tertib, dan jelas menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap layanan hukum gratis.

Dalam pelaksanaannya, mahasiswa magang dapat berkontribusi melalui pendampingan administrasi, dokumentasi kegiatan, pendataan pengaduan, serta membantu kelancaran pelayanan sesuai arahan pembina atau pendamping lapangan. Kontribusi ini memang tidak menggantikan peran paralegal maupun pihak yang berwenang, tetapi menjadi bagian pendukung agar pelaksanaan layanan POSBANKUM Desa dapat berjalan lebih tertata dan mudah dievaluasi.

Oleh karena itu, pengabdian ini diarahkan untuk menggambarkan bagaimana paralegal berperan sebagai penghubung antara masyarakat desa dan sistem layanan hukum formal melalui POSBANKUM Desa. Fokus pengabdian tidak hanya pada keberadaan POSBANKUM sebagai program, tetapi juga pada proses pelayanan yang melibatkan masyarakat, paralegal, aparat desa, penyuluh hukum, organisasi bantuan hukum, dan mahasiswa magang sebagai bagian dari ekosistem akses keadilan di tingkat desa.

Tujuan Pengabdian

1. Mendeskripsikan peran paralegal dalam pelayanan POSBANKUM Desa, khususnya dalam membantu masyarakat menerima pengaduan, memperoleh informasi hukum awal, mencatat permasalahan, dan menentukan arah penyelesaian yang sesuai.
2. Menggambarkan POSBANKUM Desa sebagai jembatan akses bantuan hukum gratis yang dekat dengan masyarakat, terutama bagi warga yang memiliki keterbatasan akses, biaya, dan pemahaman terhadap sistem layanan hukum formal.
3. Menjelaskan kontribusi mahasiswa magang dalam mendukung pelaksanaan layanan hukum desa melalui bantuan administrasi, dokumentasi, pendataan pengaduan, dan pendampingan kegiatan pelayanan hukum di bawah pembinaan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat.

METODE PENELITIAN

Pendekatan Kegiatan

Pengabdian ini menggunakan pendekatan partisipatif melalui keterlibatan langsung mahasiswa magang dalam mendukung pelaksanaan Pos Bantuan Hukum (POSBANKUM) Desa di bawah pembinaan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat. Pendekatan ini memungkinkan mahasiswa memperoleh pengalaman langsung mengenai mekanisme pelayanan hukum, peran paralegal, serta upaya peningkatan akses bantuan hukum bagi masyarakat desa.

Lokasi dan Waktu

Kegiatan dilaksanakan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat sebagai instansi pembina POSBANKUM Desa. Pelaksanaan berlangsung selama program magang, yaitu pada Februari hingga Juni.

Sasaran Kegiatan

Sasaran kegiatan meliputi masyarakat desa sebagai penerima layanan, paralegal POSBANKUM Desa, aparatur desa/kelurahan, serta Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat sebagai pembina program. Mahasiswa magang berperan sebagai pendukung kegiatan administrasi, dokumentasi, dan pengamatan proses pelayanan.

Tahapan Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu:

- Observasi terhadap pelaksanaan dan mekanisme layanan POSBANKUM Desa.
- Koordinasi dengan pembina lapangan dan paralegal terkait pelaksanaan kegiatan.
- Pendampingan administrasi, dokumentasi, dan pengelolaan data pelayanan.
- Pengamatan terhadap pelayanan hukum, meliputi penerimaan pengaduan, pemberian informasi hukum awal, penyelesaian sengketa secara nonlitigasi, serta rujukan kepada advokat atau Organisasi Bantuan Hukum apabila diperlukan.
- Evaluasi kegiatan sebagai dasar penyusunan laporan dan identifikasi kebutuhan penguatan program POSBANKUM Desa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian melalui program magang di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat memberikan gambaran langsung mengenai bagaimana program bantuan hukum masyarakat dijalankan di tingkat daerah. Kegiatan ini tidak hanya memperlihatkan aspek administratif dalam pelaksanaan POSBANKUM Desa, tetapi juga menunjukkan pentingnya peran paralegal sebagai penghubung antara masyarakat desa dengan sistem layanan hukum formal.

Berdasarkan kegiatan yang dilaksanakan selama masa magang, hasil pengabdian dapat dilihat dari beberapa aspek utama, yaitu keterlibatan mahasiswa dalam mendukung administrasi POSBANKUM Desa, pengelolaan data paralegal, pendampingan kegiatan pelatihan paralegal, serta pemahaman terhadap fungsi POSBANKUM sebagai sarana akses bantuan hukum bagi masyarakat.

Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat

Kegiatan pengabdian dilaksanakan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat dalam bidang penyuluhan dan bantuan hukum. Berdasarkan laporan magang, pelaksanaan kegiatan berlangsung sejak tanggal 10 Februari 2026 sampai dengan 15 Juni 2026, dengan pola kerja Senin sampai Kamis secara Work From Office dan hari Jumat secara Work From Anywhere. Dalam rentang waktu tersebut, mahasiswa memperoleh kesempatan untuk memahami pelaksanaan program hukum yang berorientasi pada pelayanan masyarakat, khususnya dalam bidang penyuluhan hukum, bantuan hukum, dan pengelolaan data POSBANKUM Desa.

Selama kegiatan berlangsung, mahasiswa terlibat dalam beberapa bentuk pekerjaan, antara lain membantu penginputan data desa atau kelurahan, penginputan data paralegal, pengelolaan laporan POSBANKUM, serta pendokumentasian kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan hukum masyarakat. Kegiatan tersebut memberikan pengalaman bahwa pelayanan hukum tidak hanya berkaitan dengan pemberian informasi hukum kepada masyarakat, tetapi juga membutuhkan dukungan administrasi yang rapi, data yang tertata, dan koordinasi yang baik antar pihak.

Keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan tersebut menjadi bagian dari proses pengabdian karena mendukung keberlangsungan program layanan hukum yang ditujukan kepada masyarakat desa. Dalam konteks ini, mahasiswa tidak menggantikan peran paralegal, penyuluh hukum, maupun advokat, tetapi membantu proses pendukung agar pelaksanaan POSBANKUM Desa dapat berjalan lebih tertib dan terdokumentasi.

Bentuk Kegiatan dalam Mendukung Pelaksanaan POSBANKUM Desa

Hasil kegiatan pengabdian menunjukkan bahwa pelaksanaan POSBANKUM Desa membutuhkan dukungan dari berbagai aspek, terutama dalam hal pendataan, pelaporan, dan pembinaan paralegal. Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah penginputan data desa atau kelurahan dan data paralegal ke dalam sistem yang telah disediakan. Kegiatan ini menjadi penting karena data tersebut menjadi dasar dalam memantau keberadaan POSBANKUM Desa serta kesiapan paralegal sebagai pelaksana layanan awal di masyarakat.

Mahasiswa juga membantu pengelolaan dan pelaporan data POSBANKUM. Melalui kegiatan ini, mahasiswa memahami bahwa keberadaan POSBANKUM Desa tidak hanya dilihat dari pembentukannya secara formal, tetapi juga dari bagaimana program tersebut dicatat, dilaporkan, dan dipantau oleh instansi pembina. Administrasi yang baik menjadi bagian penting dalam memastikan bahwa program bantuan hukum di tingkat desa dapat berjalan secara berkelanjutan.

Kegiatan lain yang dilakukan adalah menginput hasil laporan dari paralegal ke dalam website resmi Badan Pembinaan Hukum Nasional. Dari kegiatan tersebut, terlihat bahwa paralegal tidak hanya berperan dalam pelayanan masyarakat secara langsung, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk melaporkan kegiatan atau layanan yang dilakukan. Pelaporan tersebut penting agar pembinaan terhadap POSBANKUM Desa dapat dilakukan berdasarkan data yang jelas.

Tabel 1. Ringkasan Bentuk Kegiatan dan Hasil Pengabdian

No.	Bentuk Kegiatan	Hasil yang Dicapai
1	Penginputan data desa/kelurahan dan paralegal	Data POSBANKUM dan paralegal terdokumentasi dalam sistem yang digunakan oleh instansi pembina.
2	Pengelolaan dan pelaporan data POSBANKUM	Mahasiswa memahami pentingnya ketelitian administrasi dalam mendukung pemantauan program bantuan hukum.
3	Penginputan laporan paralegal ke website BPHN	Laporan kegiatan paralegal dapat dihimpun sebagai bagian dari proses pembinaan dan evaluasi.
4	Pendampingan administrasi penyuluhan hukum	Dokumen, data peserta, dan kebutuhan kegiatan tersusun lebih rapi dan sistematis.
5	Pelatihan paralegal dan virtual clinic	Mahasiswa memahami proses pembinaan paralegal sebagai aktor layanan hukum awal di desa/kelurahan.
6	Dokumentasi dan penyusunan laporan kegiatan	Kegiatan pengabdian memiliki bukti administratif dan dokumentasi yang mendukung penyusunan laporan akademik.

Peran Paralegal sebagai Penghubung Masyarakat dengan Layanan Hukum Formal

Dalam pelaksanaan POSBANKUM Desa, paralegal memiliki posisi yang strategis karena berada dekat dengan masyarakat. Paralegal menjadi pihak yang dapat membantu masyarakat menyampaikan permasalahan hukum secara lebih terarah. Banyak masyarakat desa yang belum memahami istilah hukum atau alur penyelesaian hukum formal, sehingga keberadaan paralegal membantu menjembatani kebutuhan masyarakat dengan layanan hukum yang tersedia.

Berdasarkan kegiatan pengabdian yang dilakukan, peran paralegal dapat dipahami dalam beberapa bentuk. Pertama, paralegal berperan dalam menerima dan mencatat pengaduan awal masyarakat. Pada tahap ini, paralegal membantu masyarakat menjelaskan

persoalan yang dihadapi, mencatat informasi penting, serta mengidentifikasi kebutuhan awal dari permasalahan tersebut.

Kedua, paralegal berperan dalam memberikan informasi hukum dasar. Masyarakat yang datang ke POSBANKUM tidak selalu membutuhkan pendampingan hukum secara langsung ke pengadilan. Dalam banyak situasi, masyarakat lebih dahulu membutuhkan penjelasan mengenai posisi hukumnya, langkah yang dapat ditempuh, serta pihak yang dapat dihubungi apabila permasalahan tersebut membutuhkan penanganan lebih lanjut.

Ketiga, paralegal berperan sebagai penghubung antara masyarakat dengan sistem layanan hukum formal. Jika suatu persoalan tidak dapat diselesaikan di tingkat desa, paralegal dapat membantu mengarahkan masyarakat kepada penyuluh hukum, advokat, atau Organisasi Bantuan Hukum yang berwenang. Dengan demikian, paralegal tidak menggantikan peran advokat, tetapi membantu masyarakat agar tidak kebingungan dalam mengakses layanan bantuan hukum.

Keempat, paralegal juga memiliki peran dalam mendukung penyelesaian masalah secara non-litigasi. Tidak semua persoalan hukum harus langsung dibawa ke pengadilan. Beberapa permasalahan masyarakat desa dapat diselesaikan melalui komunikasi, musyawarah, atau mediasi. Dalam hal ini, paralegal dapat membantu membuka ruang penyelesaian yang lebih sederhana, dekat, dan sesuai dengan karakter masyarakat desa.

Pendampingan Pelatihan Paralegal melalui *Virtual Clinic*

Salah satu hasil penting dari kegiatan pengabdian adalah keterlibatan mahasiswa dalam mendukung pelaksanaan pelatihan paralegal, termasuk kegiatan virtual clinic. Kegiatan ini memberikan pemahaman bahwa paralegal perlu mendapatkan pembinaan agar mampu menjalankan perannya secara tepat dalam pelayanan hukum masyarakat.

Pelatihan paralegal menjadi bagian penting dalam penguatan POSBANKUM Desa karena paralegal merupakan aktor awal yang berhadapan dengan masyarakat. Melalui pelatihan, paralegal dapat memahami batasan perannya, alur pelayanan bantuan hukum, cara menerima pengaduan, serta mekanisme rujukan apabila suatu permasalahan membutuhkan penanganan lebih lanjut.

Keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan ini memberikan pengalaman mengenai pentingnya koordinasi, komunikasi, dan kesiapan administrasi dalam pelaksanaan pembinaan hukum. Mahasiswa tidak hanya melihat pelatihan sebagai kegiatan formal, tetapi juga sebagai bagian dari proses memperkuat kualitas pelayanan hukum di tingkat desa.

Kontribusi Mahasiswa Magang dalam Kegiatan Pengabdian

Kontribusi mahasiswa magang dalam kegiatan pengabdian terlihat dari dukungan terhadap proses administrasi, dokumentasi, penginputan data, dan penyusunan laporan kegiatan. Peran ini bersifat pendukung, tetapi memiliki arti penting dalam menunjang efektivitas pelaksanaan POSBANKUM Desa.

Dalam kegiatan penginputan data, mahasiswa dituntut untuk teliti dan bertanggung jawab karena data yang dikelola berkaitan dengan desa/kelurahan, paralegal, dan laporan kegiatan POSBANKUM. Kesalahan dalam penginputan data dapat berdampak pada ketidaktepatan informasi yang digunakan dalam proses pemantauan dan evaluasi program.

Selain itu, mahasiswa juga memperoleh pengalaman dalam menyusun dokumen dan laporan kegiatan secara sistematis. Kegiatan ini memberikan pemahaman bahwa pelayanan hukum masyarakat tidak hanya bergantung pada kemampuan memahami hukum, tetapi juga pada kemampuan mengelola administrasi dan informasi secara tertib.

Dari sisi non-teknis, kegiatan pengabdian membantu mahasiswa mengembangkan kemampuan komunikasi, kerja sama tim, manajemen waktu, adaptasi, serta etika kerja di lingkungan pemerintahan. Kemampuan tersebut penting karena pelaksanaan program bantuan hukum melibatkan banyak pihak, mulai dari pegawai instansi, paralegal, aparatur desa, hingga masyarakat.

POSBANKUM Desa sebagai Sarana Akses Keadilan Masyarakat

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa POSBANKUM Desa memiliki peran penting sebagai pintu awal akses bantuan hukum bagi masyarakat. Keberadaan POSBANKUM membantu masyarakat desa memperoleh informasi hukum secara lebih dekat dan mudah dijangkau. Hal ini menjadi penting karena tidak semua masyarakat memiliki kemampuan ekonomi, pengetahuan, atau keberanian untuk langsung mengakses lembaga hukum formal.

Dalam konteks ini, POSBANKUM Desa dapat dipahami sebagai ruang pelayanan yang menjembatani kebutuhan masyarakat dengan sistem hukum formal. Masyarakat yang sebelumnya tidak mengetahui alur penyelesaian hukum dapat memperoleh arahan awal melalui POSBANKUM. Apabila persoalan tersebut membutuhkan penanganan lebih lanjut, masyarakat dapat diarahkan kepada pihak yang lebih berwenang, seperti Organisasi Bantuan Hukum atau advokat.

Peran paralegal menjadi sangat penting dalam proses tersebut. Paralegal membantu menerjemahkan persoalan masyarakat yang sering kali disampaikan dalam bentuk cerita sehari-hari menjadi informasi awal yang lebih terstruktur. Dengan cara ini, masyarakat dapat lebih mudah memahami jenis persoalan yang dihadapi serta pilihan penyelesaian yang tersedia.

Dari sudut pandang pengabdian, kegiatan ini menunjukkan bahwa pelayanan hukum masyarakat tidak hanya membutuhkan regulasi, tetapi juga aktor lokal yang mampu berkomunikasi dengan masyarakat. Paralegal memiliki kedekatan sosial dengan warga sehingga lebih mudah diterima sebagai pihak pertama yang membantu masyarakat mencari solusi atas persoalan hukum yang dihadapi.

Pentingnya Administrasi dan Data dalam Pelaksanaan POSBANKUM Desa

Selain peran paralegal, kegiatan pengabdian juga memperlihatkan bahwa administrasi dan pengelolaan data merupakan bagian penting dari pelaksanaan POSBANKUM Desa. Data desa/kelurahan, data paralegal, serta laporan kegiatan menjadi dasar bagi instansi pembina untuk mengetahui perkembangan program di lapangan.

Penginputan data ke dalam sistem BPHN menunjukkan bahwa pelaksanaan POSBANKUM Desa tidak hanya berjalan secara manual, tetapi juga didukung oleh sistem informasi yang membantu proses pelaporan dan pemantauan. Dengan adanya sistem tersebut, data pelaksanaan program dapat dihimpun secara lebih teratur dan dapat digunakan untuk kepentingan evaluasi.

Namun, pengelolaan data juga memerlukan ketelitian. Setiap data yang dimasukkan harus sesuai dengan informasi yang sebenarnya agar tidak menimbulkan kekeliruan dalam proses pelaporan. Oleh karena itu, kegiatan administrasi yang dilakukan mahasiswa selama magang menjadi bagian penting dalam mendukung ketertiban pelaksanaan program.

Dampak Kegiatan Pengabdian

Kegiatan pengabdian memberikan beberapa dampak positif. Bagi mahasiswa, kegiatan ini memberikan pengalaman langsung mengenai pelaksanaan program bantuan hukum masyarakat, pengelolaan data POSBANKUM, serta pembinaan paralegal. Mahasiswa juga memperoleh pemahaman bahwa hukum tidak hanya dipelajari dalam bentuk teori, tetapi juga dijalankan melalui pelayanan publik, administrasi, dan komunikasi dengan masyarakat.

Bagi instansi, keterlibatan mahasiswa magang membantu mendukung pekerjaan administratif, dokumentasi, dan penyusunan laporan kegiatan. Dukungan ini dapat membantu proses kerja menjadi lebih tertata, terutama dalam kegiatan yang berkaitan dengan pendataan dan pelaporan POSBANKUM Desa.

Bagi masyarakat, keberadaan POSBANKUM Desa dan paralegal memberikan peluang yang lebih besar untuk memperoleh informasi dan bantuan hukum secara gratis. Masyarakat tidak harus langsung berhadapan dengan proses hukum yang rumit, tetapi dapat

memulai dari konsultasi awal, pengaduan, atau arahan sederhana melalui POSBANKUM Desa.

Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini memperlihatkan bahwa POSBANKUM Desa tidak hanya berfungsi sebagai program bantuan hukum, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan hukum masyarakat. Melalui peran paralegal, masyarakat desa dapat lebih mudah terhubung dengan layanan hukum formal, sementara mahasiswa magang memperoleh pengalaman nyata dalam mendukung pelaksanaan pelayanan hukum di lingkungan pemerintahan.

Kendala dan Pembelajaran dalam Pelaksanaan Kegiatan

Berdasarkan kegiatan yang dilakukan, salah satu pembelajaran penting dalam pelaksanaan POSBANKUM Desa adalah perlunya ketelitian dalam pengelolaan data dan administrasi. Data yang berkaitan dengan desa/kelurahan, paralegal, dan laporan kegiatan harus disusun secara rapi agar mudah digunakan dalam proses pemantauan program.

Selain itu, pelaksanaan kegiatan juga membutuhkan koordinasi yang baik antara mahasiswa, pegawai pembina, paralegal, dan pihak lain yang terlibat. Koordinasi menjadi penting karena program POSBANKUM Desa melibatkan banyak unsur, mulai dari pemerintah, masyarakat, paralegal, hingga lembaga bantuan hukum.

Pembelajaran lainnya adalah bahwa pelayanan hukum kepada masyarakat membutuhkan pendekatan yang komunikatif. Masyarakat desa tidak selalu memahami bahasa hukum formal, sehingga diperlukan pihak yang mampu menjelaskan alur layanan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Dalam hal ini, paralegal memiliki peran penting sebagai penghubung yang dapat membantu masyarakat memahami persoalan dan pilihan penyelesaian hukum.

Secara keseluruhan, hasil kegiatan pengabdian menunjukkan bahwa peran paralegal dalam POSBANKUM Desa sangat penting dalam memperluas akses bantuan hukum bagi masyarakat. Paralegal menjadi jembatan awal antara masyarakat desa yang membutuhkan bantuan hukum dengan sistem layanan hukum formal. Sementara itu, keterlibatan mahasiswa magang memberikan dukungan terhadap aspek administrasi, dokumentasi, dan pengelolaan data yang menjadi bagian penting dalam keberlanjutan program POSBANKUM Desa.

SIMPULAN

Kegiatan pengabdian melalui program magang di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat menunjukkan bahwa Pos Bantuan Hukum (POSBANKUM) Desa memiliki peran penting dalam memperluas akses masyarakat terhadap layanan hukum. Paralegal berperan sebagai penghubung antara masyarakat dengan sistem bantuan hukum formal melalui penerimaan pengaduan, pemberian informasi hukum awal, pendampingan penyelesaian sengketa secara nonlitigasi, serta rujukan kepada advokat atau Organisasi Bantuan Hukum apabila diperlukan. Keterlibatan mahasiswa magang turut mendukung pelaksanaan program melalui kegiatan administrasi, dokumentasi, dan pengelolaan data sehingga pelayanan POSBANKUM Desa dapat berjalan lebih tertib, efektif, dan berkelanjutan.

Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan POSBANKUM Desa, diperlukan penguatan kapasitas paralegal melalui pembinaan dan pelatihan yang berkelanjutan, disertai peningkatan koordinasi antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum, pemerintah desa, dan Organisasi Bantuan Hukum. Selain itu, sosialisasi mengenai layanan bantuan hukum gratis perlu terus ditingkatkan agar masyarakat semakin memanfaatkan POSBANKUM Desa sebagai sarana memperoleh akses keadilan secara mudah, cepat, dan tepat. Penguatan kapasitas paralegal dan optimalisasi penyelenggaraan POSBANKUM Desa diharapkan mampu meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat secara berkelanjutan (Permenkumham RI No. 3 Tahun 2021).

DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Hukum Republik Indonesia. (2025). *Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan*. <https://jogja.kemenkum.go.id/hukum/layanan-posbankum>
- Maharani, M., Budiarti, A. I., Puteri, B. P. T., & Arianto, G. N. (2024). *Community-Based Paralegals for Access to Justice in Indonesia: A Strategic Enhancement*. *Journal of Contemporary Sociological Issues*, 4(2). <https://doi.org/10.19184/csi.v4i2.45781>
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum.
- Setiawan, D. (2021). *Access to Justice and Fair for the Poor: How Effective the Legal Aid Provided by Government? The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education*, 3(2), 173–184. <https://doi.org/10.15294/ijicle.v3i2.46173>